

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936 Website: http://simap-new.sulselprov.go.id Email: ptsp@sulselprov.go.id Makassar 90231

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN

Nomor: 1202409058

TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SLB A.DW SALUPUTTI KEPADA

YAYASAN PENDIDIKAN SIMBOLONG MANIK DHARMA WANITA KABUPATEN TANA TORAJA

Membaca

: Surat Permohonan dari Kepala Sekolah SLB A Dharma wanita Saluputti Nomor:024/SLB A DWS/TT/IV/2024 tanggal 30 April 2024 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional;

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor:421.8/6323-P.PK-PLK.BS/DISDIK Tanggal 07 Juni 2024 Perihal Hasil Verifikasi dan Visitasi Yayasan Pendidikan Simbolong Manik. dan Hasil Verifikasi Oleh Tim Verifikasi Yang Dilaksanakan Pada Tanggal 27 s/d 29 Mei 2024 Menyatakan Bahwa Sekolah Luar Biasa Swasta (SLBS)) SLB A.DW SALUPUTTI Layak Diberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Luar Biasa Swasta (SLBS) SLB A.DW SALUPUTTI.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan:
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Non Perizinan;

9. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

Memperhatikan::

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:100/Kep/I06/HK/1997 Tanggal 9 September 1997 Tentang Persetujuan/Pendirian Sekolah Luar Biasa (SLB) Bagian A swasta Dharma Wanita Kabupaten Tana Toraja.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SLB A.DW SALUPUTTI;

KESATU : Menyetujui penyelenggaran PERPANJANGAN Izin Operasional Kepada;

Nama Sekolah : SLB A.DW SALUPUTTI

Alamat : Jl Tamba'narang Kel RatteTalongeKec.SaluputtiKab Tana

Toraja

No. Telpon/HP : 082293143256

NPWP : 00.693.782.5-803.000

KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan

melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan

yang berlaku;

KETIGA PERPANJANGAN Izin Operasional ini berlaku selama 5 (Lima) tahun, terhitung

sejak ditetapkannya keputusan ini;

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar Pada Tanggal 11 Juni 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.Si.

Pangkat: PEMBINA TINGKAT I Nip: 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth

- 1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (Sebagai Laporan) di Makassar
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatandi Makassar

3. Kepala Dinas Pendidikan Kota/Kab Tana Toraja

- 4. Kepala Cabang Wil.X Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
- 5. Ketua Yayasan PENDIDIKAN SIMBOLONG MANIK DHARMA WANITA KABUPATEN TANA TORAJA

6. Kepala SLB A Dharma wanita Saluputti

7. Pertinggal

NOMOR REGISTRASI 20240502105252



Catatan

• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'

• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code



K E P U T U S A N MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 100/Kep/106/HK/1997

Tentang

Percetujuan Penyelenggaraan/Pendirian Sekolah Luar Biasa (SLB) Bagian A Swasta Dharma Wanita Kabupaten Tanah Toraja

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : Surat Kepala Kandep Dikbud Kabupaten Tanah Toraja Nomor: 524 / 106.18 / TU/ 1997 tanggal, 2 Juni 1997 dan surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Simbolong Manik Nomor: 06/YPSM/DW/TT/96 tanggal, 5 Oktober 1996 beserta lampirannya;
- Menimbang: a. bahwa Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal, 23 Februari 1983 Nomor: 018/C/Kep/I.83 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
 - b. bahwa pada pasal 3 ayat 1 dan 2, pasal 11 ayat 1 dan 2, pasal 12 ayat 1, 2 dan 3 Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud tersebut pada sub. a di atas diteruskan pendelegasian wewenang Mendikbud kepada Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sulawesi Selatan untuk memberikan Keputusan persetujuan terhadap Pemohon/Penyelenggara Sekolah Swasta yang bersangkutan.
 - e. bahwa sehubungan dengan sub. a. dan b di atas dipandang perlu memberikan persetujuan penyelenggaraan/pendirian Sekelah Luar Biasa (SLB) Bagian A Swasta Dharma Wanita Kabupaten Tanah Toraja.
- Mengingat : 1. U. U. Nomor: 2 tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia; v
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor: 72 tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Biasa;
 - Peraturan Pemerintah Nomor: 39 tahun 1992, tentang Peranserta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional;
 - 4. Keputusan Mendikbud R.I:
 a. Tanggal, 22 Nopember 1982 Nomor: 0374/U/1982 tentang
 Pembinaan Sekolah Swasta;
 - b. Tanggal, 14 Maret 1983 Nomor: 0173/0/1988 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Depdikbud;
 - C. Tanggal, 12 Juli -1984 Nomor: 0304/0/1984 tentang Perincian Tugas Satuan Organisasian Koordinator Urusan Administrasi, Pengawas dan Penilik di Lingkungan Instansi Vertikal Depdikbud;
 - d. Tanggal, 24 Februari 1993 Nomor: 059/U/1993 tentang Pedeman Pemberian Bantuan kepada Sekolah Swasta;

23 Februari 1983 Nomor: 019/C/Rep/I.1983 tentang Standarinani Sekolah Swasta.

Semua Ketentuan dan Petunjuk mengenai Pendirian Taman Kanak kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Luar Biasa dalam Pembinaan Direktorat Pendidikan Dasar Ditjen Dikdasmen Depdikbud.

MEMUTUSKAN

Mone tapkan:

Memberikan persetujuan kepada Penyelenggara / Pendiri Sekolah Luar Biasa (SLB) Bagian A Swasta Dharma Wanita yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin No.3 Kecamatan Makale Kabupaten Tanah Teraja; P

(satu) tahun Penyelenggara/Pendiri Sekolah/Yayasan Koputusan ini batal dengan sendirinya apabila dalam berusingkutan ternyata tidak dapat menyelenggarakan Sekolah Sebagai persyaratan yang berlaku;

Biaya yang digunakan untuk penyelenggaraan Sekelah terpebut berasal dari uang yang diusahakan oleh Yayasan atau Badan Penyelenggara Sekolah yang bersangkutan ditambah dengan bantuan dan pendapatan lain yang syah Lersasuk bantuan dari Pemerintah,

Yayasan yang bersangkutan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sulawesi Selatan tentang Penyelenggaraan / Pengelelaan Sekelah Luar Biasa (SLB) Swasta Bagian A Dharma Wanita di maksud;

Hal-hai lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan Brabur dalam Keputusan tersendiri.

Zeputuman ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan kebentuan bilamana kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimans mestinya.

DITETAPEAN DI : UJUNG PANDANG PADA TANGGAL : S SEPTEMBER 1997

Nenteri Pendidikan dan Kebudayaan Dilak Kepablik Indonesia

Pendidikan dan Kebudayaan

Pendidikan dan Kebudayaan

Mara Mara Pendidikan dan Kebudayaan

Mara Mara Mara Mara Salawesi Selatan, A. ARIFIN THALLB

khammen Depdikkud 11 Jakurta 1130m Dikdammon Depdikkud di Jakurt 11 Depdikkud Franckul Bell di U.Pam Marwel Bepdikkud Franckul Bel